

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan matriks hasil dari penelitian terdahulu mengenai peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran kewargaan pada masa di era *new normal* yang dijadikan acuan referensi dalam skripsi ini, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Temuan dari masing-masing rumusan
Fazli Rachman & Ilham Fitra	Kewarganegaraan dan kesehatan: Partisipasi Warga Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia	Bagaimana partisipasi warga dalam relasi studi kewarganegaraan dan kesehatan	Metode Kualitatif deskriptif	Warga saling membantu pemerintah selama penanganan Corona warga melakukan edukasi baik secara individu atau bersama-sama. Upaya dari peran ini diharapkan dapat mendiseminasikan informasi Covid-19, sehingga dapat menambah wawasan warga dalam membangun sikap dan etika.
Ardhana Januar Mahardhani	Menjadi Warga Negara yang Baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru	Melihat pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan kenormalan baru	Metode Kualitatif pendekatan kepustakaan	Munculnya Covid-19 merubah segala tatanan kehidupan, seperti tata laku masyarakat serta rekonstruksi struktur social yang ada. Masyarakat sebagai bagian dari warga Negara yang berkebajikan atau Civic Virtue dalam menghadapi pandemic Covid-19 sangat di harapkan menjadi individu yang mempunyai karakter disiplin
Firda Aulia Izzati	Pentingnya sikap toleransi dan empati dalam mewujudkan warga negara yang baik (Good citizenship) di masa pandemi.	Pentingnya sikap toleransi dan empati dalam mewujudkan warga negara yang baik di masa pandemi Covid19.	Metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif	Warga Negara yang baik terwujud dari dibangunnya sikap toleransi dan empati untuk memberikan dampak positif bagi negerinya sendiri. Saling menguatkan satu sama lain serta tertanamnya rasa persatuan dan kesatuan dalam melewati keadaan di masa pandemic Covid-19 dengan baik di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Temuan dari masing-masing rumusan
Chris Apandie & Karolina	Warga Negara di masa pandemi: perspektif civic virtue (pengabdian kepada masyarakat di komunitas pelayanan GBI Anugerah Kota Palangkaraya).	1. Mindset warga negara yang kurang adaptif di masa pandemi 2. penerapan pemberdayaan masyarakat belum tepat penerapannya di komunitas pelayanan GBI Anugerah Kota Palangkaraya	Metode pengabdian berbasis riset	Dimasa pandemic maupun setelah kenormalan baru, diharapkan warga kesadarannya semakin meningkat akan adanya suatu kewajiban agar lebih perasa serta mengutamakan kebijakan kewarganegaraan sebagai menjaga kualitas karakter dari warga Negara yang seutuhnya.
Siti Khodijah Nurul Aulia	Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia	Peran tokoh agama dalam membantu memutus mata rantai penyebaran dan membantu masyarakat yang terdampak	Metode deskriptif-analisis	Peran tokoh agama dalam menghadapi covid-19 berperan sebagai peredam kekalutan umat(motivator), corong informasi pandemi (komukator), dan figur tauladan (idol).
Cucu Arumsari , Eko Yulianto , Euis Nur'Affah	Sosialisasi dalam rangka memelihara kesadaran warga pada kesehatan di masa pandemi covid-19	sosialisasi terus menerus kepada masyarakat mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan Covid-19	Metode Kualitatif	Kebijakan PSBB atau kehidupan new normal, mayoritas masyarakat beranggapan bahwa kondisi lingkungan sudah pulih, Hal ini mengakibatkan aktivitas masyarakat sama seperti sebelumnya Yang yang tidak memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penularan covid 19 walaupun faktanya masih banyak yang terindikasi positif covid 19.

Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Temuan dari masing-masing rumusan
Regina Permata dewi, Tubagus Umar Syarif Hadi Wibowo	Civic values dan covid-19: tantangan dan respons kewarganegaraan di masa pandemi	Tantangan dan Respons Kewarganegaraan di Masa Pandemi	Metode Kualitatif	Tantangan dan respon dua hal yang penting akan kita jalani terutama saat kita masih menelusuri dunia ini. Dua hal ini sifatnya sangat erat serta tidak akan pernah lekat sedikitpun dari kehidupan manusia. Tantangan dan respon menjadi baik atau buruknya sudah sebuah tanggungan dari akibat yang telah kita tanam
Rahmi Yuningsih	Promosi kesehatan pada kehidupan new normal pandemi covid-19	Upaya meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kehidupan new normal melalui optimalisasi promosi kesehatan	Metode Kualitatif	Slogan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat menjadi PHBS. Yang masa berlakunya sudah ada sebelum pandemi covid 19 tetapi masih rendah kegiatan ini, terdiri dari kebiasaan mencuci tangan lalu menggunakan sabun, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi serta rutinya menjalankan olahraga setelahnya beristirahat yang cukup.
Akmal Salim Ruhana & Haris Burhani	Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Umat Beragama Menghadapi Covid-19	Upaya pencegahan serta bagaimana sikap pada berbagai kebijakan yang berkaitan dalam penanganan pandemi covid 19	Metode Kualitatif	Dalam penelitian ini terdapat informasi mengenai perilaku serta tindakan responden umat yang beragama sesuai dengan pengetahuannya tentang informasi covid 19 dan berbagai kebijakan yang berkaitan selama pandemik yang sedang terjadi saat ini

Berdasarkan tabel diatas penulis mendeskripsikannya dalam bentuk narasi, penjabarannya sebagai berikut:

1. Rujukan penelitian pertama, Fazli Rachman & Ilham Fitra dengan judul “Kewarganegaraan dan kesehatan: Partisipasi Warga Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang partisipasi warga dalam penanganan Pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa perilaku warga membantu pemerintah selama penanganan Covid-19 serta perilaku warga saling mengedukasi satu sama lain agar dapat memutus mata rantai Covid-19.
2. Rujukan penelitian kedua, Ardhana Januar Mahardhani dengan judul “Menjadi Warga Negara yang Baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru”. Dalam penelitian ini penulis membahas pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan kenormalan baru. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini masyarakat sebagai *Civic Virtue* diharapkan menjadi individu yang mempunyai karakter disiplin.
3. Rujukan penelitian ketiga, Firda Aulia Izzati dengan judul “Pentingnya sikap toleransi dan empati dalam mewujudkan warga Negara yang baik (*Good Citizenship*) di masa pandemi. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini warga Negara yang baik terwujud dari dibangunnya sikap toleransi dan empati untuk memberikan dampak positif bagi negerinya sendiri.

4. Rujukan penelitian keempat, Chris Apandie & Karolina dengan judul “Warga Negara di masa pandemi: perspektif *civic virtue* (pengabdian kepada masyarakat di komunitas pelayanan GBI Anugerah Kota Palangkaraya)”. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan masa pandemi maupun *new normal* warga Negara kesadarannya semakin meningkat atas suatu kewajibannya dengan mengutamakan kebajikan kewarganegaraan.

5. Rujukan penelitian kelima, Siti Khodijah Nurul Aulia dengan judul “Peran tokoh agama dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19 di media online Indonesia”. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil pembahasan Peran tokoh agama dalam menghadapi covid-19 berperan sebagai peredam kekalutan umat (motivator), corong informasi pandemi (komunikator), dan figur tauladan (idol).

6. Rujukan penelitian keenam, Cucu Arumsari, Eko Yulianto, Euis Nur Afifah dengan judul “Sosialisasi dalam rangka memelihara kesadaran warga pada kesehatan di masa pandemi Covid-19. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan memperhatikan protokol kesehatan di *era new normal* agar mencegah penularan Covid-19.

7. Rujukan penelitian ketujuh, Regina Permatadewi, Tubagus Umar Syarif Hadi Wibowo dengan judul “*Civic values* dan covid-19: Tantangan dan respon kewarganegaraan di masa pandemi”. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan tantangan dan respon sifatnya sangat erat dari kehidupan manusia.

8. Rujukan penelitian kedelapan, Rahmi Yuningsih dengan judul “Promosi kesehatan pada kehidupan *new normal* pandemi Covid-19”. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan kegiatan PHBS yang masih rendah dilakukan walaupun sudah ada sebelum pandemi Covid-19.

9. Rujukan penelitian kesembilan, Akmal Salim Ruhana & Haris Burhani dengan judul “Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Umat Beragama Menghadapi Covid-19. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil Pembahasan perilaku serta tindakan responden umat beragama sesuai dengan pengetahuannya mengenai Covid-19

Dari adanya hasil penelitian yang terdahulu diharapkan mampu menjadi bahan referensi guna membantu peneliti saat melakukan penelitian yang berjudul “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Kewargaan Di Era *New Normal*”.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya ialah mengenai peran tokoh masyarakat guna mengatur masyarakat, serta melihat, mengatur, memberi bantuan sosialisasi agar kesadaran kewargaan masyarakat dapat beradaptasi dalam kondisi pandemi maupun *new normal*.

Walaupun banyak terdapat penelitian terdahulu mengenai peran tokoh masyarakat di era *new normal*. Tetapi penelitian ini masih perlu dilakukan karena penelitian yang akan peneliti lakukan mempunyai perbedaan dari penelitian terdahulu.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya pertama dari lokasi dan situasi, lokasi penelitian saya Pejaten Barat dan Jagakarsa merupakan

zona merah yaitu suatu wilayah yang memiliki intensitas penyebaran Covid-19 yang luas dan jumlah kasus konfirmasi yang tinggi serta dianggap berbahaya. Wilayah yang pada saat pandemi covid berada di zona merah bahkan di zona hitam banyak warga yang positif covid-19 bahkan meninggal dunia karena virus ini. Kedua secara substansi saya membahas mengenai *new normal* bagaimana cara masyarakat beradaptasi, bagaimana masyarakat merekonstruksi, dan bagaimana masyarakat melakukan strukturalisasi. Ketiga adalah urgensi saya melihat bagaimana tokoh masyarakat berperan di kondisi *new normal*, diperlukannya terobosan-terobosan baru untuk menanggulangi covid-19.

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

2.2.1 Tokoh Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat, 2005:158 pada tiap-tiap masyarakat memiliki standar penilaian yang berbeda satu sama lain perihal penentuan jabatan dan kedudukan didalam masyarakat itu sendiri, saat kedudukan individu tersebut dianggap terhormat di masyarakatnya belum tentu memiliki kedudukan yang sama di masyarakat lain bahkan bisa juga dianggap rendah di masyarakat yang berbeda. Karena hal ini masyarakat memiliki penilaian yang berbeda dalam pengukuran tinggi rendahnya kedudukan seseorang ada yang dilihat dari besar kecilnya kekuasaan ada pula pengukuran kedudukannya berupa kekayaan, kepintaran, skill, serta pengetahuan ataupun kombinasi dari semuanya.

Soerjono Soekanto (2001: 318) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau

pengikut-pengikutnya. Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Tugas pokok pemimpin menurut Soerjono Soekanto (2001: 326), secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang pemimpin sebagai berikut.

- a. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata).
- b. Mengawasi, mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
- c. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpin

Masyarakat memiliki 2 macam kepemimpinan, yaitu pemimpin yang statusnya formal dan pemimpin yang statusnya informal. Diangkatnya pemimpin formal terbentuk dari sebuah organisasi yang memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi agar dapat memiliki jabatan tertentu didalam struktur organisasi tersebut, segala hak dan kewajiban yang

telah dipegangnya agar tujuan dari organisasi yang telah ditargetkan tercapai. Tokoh masyarakat (informal leader) ialah seseorang yang memiliki pengaruh dan ditokohkan oleh lingkungan sekitarnya. Tindakan serta ucapannya menjadi acuan untuk diikuti oleh masyarakat lingkungannya. Pemimpin informal merupakan pemimpin yang pengukuhanannya tidak resmi berdasarkan surat keputusan tertentu, pemimpin informal mendapatkan pengaruhnya atas dasar ikatan-ikatan psikologis. Kedudukan yang diperoleh berasal dari pengakuan masyarakat di lingkungannya akan diri tokoh masyarakat tersebut. Faktor lainnya yang dapat dilihat agar individu dapat dikatakan sebagai tokoh masyarakat dapat dilihat dari waktu yang cukup lama dari terjalannya keterikatan mental dengan daerah tersebut, faktor usia, serta kemampuan dari individu tersebut

Kepemimpinan yang ada di masyarakat ialah terbangun akibat adanya pola hubungan atau relasi sosial sehingga dapat saling mempengaruhi berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada cukup lama serta menentukan kepentingan bersama. Pemimpin memiliki fungsi salah satunya untuk memotivasi individu lain agar individu tersebut mau melakukan tugas yang diembannya dengan rasa tanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan yang dimaksud peran tokoh masyarakat ialah orang-orang yang ditokohkan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi lingkungan masyarakatnya yaitu, kekuasaan dimana keahlian yang dimiliki seseorang agar orang lain mau menuruti kehendak yang diperintahkannya disebut sebagai kekuasaan. Keahlian membuat orang lain patuh akan kehendaknya (kekuasaan) mencakup semua bidang kehidupan dan dijalankan dan juga memberikan keputusan-keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung

dapat berpengaruh pada tindakan-tindakan pihak lainnya. Max Weber memberikan definisi mengenai kekuasaan merupakan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang guna membuat masyarakat tersadar akan kemauan-kemauannya sendiri dan juga menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.¹

Konsep Weber tentang Otoritas:

1. Otoritas Legal-Rasional

Otoritas legal ialah suatu bentuk sekelompok orang yang disebut organisasi yang fungsi-fungsinya resmi terikat pada aturan. Kompetensi yang dimiliki anggotanya melibatkan bidang yang menjalankan kewajiban serta fungsi di setiap pembagian kerjanya yang sistematis, penyediaan incumbent dengan kuasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi dan unit tersebut melakukan kekuasaan yang terorganisir atau disebut organisasi administrasi.² Otoritas legal legitimasinya pada keyakinan formalistic pada supremasi hukum pada segala isi spesifiknya. Tujuan dari dibuatnya aturan-aturan legal ini untuk memajukan pencapaian rasional atas kesepakatan dan untuk tujuan bersama. Dalam system ini semua patuh pada seperangkat prinsip impersonal. Contohnya seperti pemerintahan modern yang mempunyai monopoli dari penggunaan paksaan fisik yang sah, prinsip-prinsip yang setara terlihat dari badan-badan eksekutifnya. Atasan memiliki otoritas ke bawahannya namun semuanya tunduk pada otoritas badan resmi yaitu regulasi impersonal jadi otoritas legal dilambangkan sebagai pemerintahan hukum,

¹ Max Weber, *Essay in Sociology*, Oxford University Press, 1946, hal.180, yang diterjemahkan oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea, *Sosiologi, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2006

² Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), 346

bukan individu”.

2. Otoritas Kharismatik

Menurut Max Weber mengenai otoritas Kharisma dilihat dari sebuah kualitas dari individu tersebut.³ Otoritas Kharisma dapat dilihat dari setia para pengikutnya, kesucian yang luar biasa, memiliki sikap heroisme, ataupun kemampuan yang istimewa.⁴ Otoritas kharismatis yang pengakuannya berdasarkan kualitas luar biasa atau istimewa seperti yang dilakukan oleh pahlawan.

3. Otoritas Tradisional

Dalam otoritas tradisional individu yang memiliki tatanan sosial memiliki kesucian, abadi, dan tidak boleh dilanggar. Sosok orang tua atau kelompok yang dominan, dilihat dari warisannya yang telah dianggap untuk ditetapkan sebelumnya untuk memerintah orang lain. Masyarakat yang terikat dengan penguasa karena ketergantungan personal dan kesetiiaannya pada adat istiadat yang telah diyakini contohnya hak-hak ilahi para raja.⁵

Kekuasaan dapat dilihat pada interaksi sosial antar manusia maupun antar kelompok yang mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu :

1. Rasa takut, perasaan takut pada seseorang akan menimbulkan kepatuhan terhadap segala kemajuan dan tindakan orang yang ditakuti tersebut. Rasa takut merupakan gejala universal yang terdapat di segala tempat dan

³ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), 358.

⁴ George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: MC Graw Hill, 2008), 220.

⁵ George Ritzer, 2008: 132.

biasanya dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat yang mempunyai pemerintahan otoriter

2. Rasa cinta menghasilkan perbuatan yang pada umumnya bersifat posesif, apabila ada suatu reaksi positif dari masyarakat yang dikuasai maka sistem kekuasaan akan dapat berjalan dengan baik dan teratur.
3. Kepercayaan bisa timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Soal kepercayaan sangat penting demi kelanggengan kekuasaan.
4. Pemujaan Sistem kepercayaan mungkin dapat disangkal oleh orang lain, tetapi sistem pemujaan membawa seseorang dan kelompok untuk membenarkan segala sesuatu yang datang dari penguasa tersebut. Kekuasaan yang telah dilaksanakan, memerlukan serangkaian cara atau usaha-usaha untuk mempertahankannya. Setiap penguasa (pemimpin) yang telah memegang kekuasaan didalam masyarakat, demi stabilnya masyarakat, akan berusaha untuk mempertahankannya.

2.2.2 Citizenship

Rowbotham, McKinnon, Leach, Lamberts, & Hawe (2009) dalam studinya ilmu kewarganegaraan seringkali melibatkan warga yang ada di dunia untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kewarganegaraan menurut Isin dan Wood sebagai kombinasi dari seperangkat tindakan (Budaya, simbolik, ekonomi) dengan hak-hak dan kewajiban (Sosial, Sipil, Politik) yang menentukan keanggotaan dalam suatu komunitas politik⁶. Kewarganegaraan menurut Turner ialah kewarganegaraan

⁶ Engin F. Isin dan Patricia K. Wood, *Citizenship and Identity* (London: Sage, 1999), hlm. 4.

dapat dirumuskan sebagai seperangkat tindakan (Yuridis, Politis, Ekonomi, Kebudayaan) dalam hal ini seseorang didefinisikan sebagai anggota kompeten dari suatu masyarakat, yang sebagai akibatnya turut membentuk aliran sumber daya ke individu ke kelompok-kelompok sosial⁷.

Definisi diatas Turner menekankan bahwa kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan, bukan hanya kumpulan hak-hak kewajiban yang pasif. Turner memperluas konsep kewarganegaraan persoalan kewarganegaraan kearah persoalan distribusi kekuasaan, ketidak setaraan, dan perbedaan dalam kelas-kelas sosial di masyarakat.⁸

Kewarganegaraan bagi Marshall adalah status yang diberikan kepada mereka yang menjadi anggota penuh suatu komunitas. Mereka yang memiliki status ini setara dalam hal-hak dan kewajiban yang menyertainya. Namun, tidak ada prinsip universal yang menentukan apa hak dan kewajiban itu. Marshall membagi kewarganegaraan menjadi tiga bagian, yaitu: Sipil, Politik, dan Sosial.

Pada awalnya, ketiga unsur kewarganegaraan ini melebur, sebagai akibat dari meleburnya institusi. Marshall melanjutkan penelusuran sejarah kewarganegaraan dengan mempelajarinya sebagai proses fusi dan pemisahan, dimana fusi itu bersifat geografis dan pemisahan fungsional. Dia menugaskan perkembangan setiap bagian untuk satu abad-hak sipil untuk abad kedelapan belas, politik untuk abad kesembilan belas dan sosial untuk abad kedua puluh. Terdapat bagian-bagian dari kewarganegaraan serta perkembangannya.

⁷ Bryan S. Turner, "Contemporary Problem in the Theory of Citizenship," op.cit., hlm. 2.

⁸ Robertus Rober Hendrik Boli Tobi, "Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan Dari Marx Sampai Agamben", hlm. 9.

Unsur sipil terdiri dari hak-hak yang diperlukan untuk kebebasan individu, seperti kebebasan pribadi, kebebasan berbicara, hak untuk memiliki properti, kebebasan berpikir, dan lain-lain. Lembaga yang paling langsung terkait dengan hak-hak sipil adalah pengadilan. Ini juga termasuk hak untuk bekerja, yaitu mengikuti pekerjaan pilihan seseorang, sesuatu yang ditolak oleh undang-undang dan kebiasaan.

Unsur sipil adalah yang pertama muncul, pada abad kedelapan belas. Dalam periode pembentukannya, itu adalah penambahan bertahap hak-hak baru ke status yang sudah ada. Dengan kewarganegaraan sipil, hukum dan kesetaraan dijamin untuk melindungi kebebasan rakyat, seperti hak untuk bekerja, hak untuk bergerak bebas dan lain-lain. Kewarganegaraan sipil membuka jalan untuk bergerak menuju kewarganegaraan politik.

Unsur politik terutama berarti hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan politik, sebagai anggota badan yang memiliki otoritas politik atau sebagai pemilih dari anggota badan tersebut., dimana lembaga terkait adalah parlemen dan dewan pemerintah daerah. Elemen politik muncul pada abad kesembilan belas ketika hak-hak sipil yang melekat pada status kebebasan sudah menjadi inti dari gagasan umum kewarganegaraan. Kewarganegaraan politik dimaksudkan untuk memberikan hak-hak lama kepada bagian-bagian masyarakat yang baru. Hak pilih universal menandai awal kewarganegaraan politik bagi individu, bagaimanapun, Marshall menegaskan bahwa hak pilih politik bukanlah salah satu hak kewarganegaraan tetapi sebenarnya hak istimewa kelas ekonomi terbatas.

Unsur sosial berarti dapat hidup bermasyarakat sebagai makhluk yang beradab, menurut standar yang berlaku dalam masyarakat dengan kesejahteraan ekonomi dan keamanan hak untuk berbagi sepenuhnya dalam warisan sosial. Lembaga-lembaga dari sistem pendidikan dan pelayanan-pelayanan sosial berhubungan paling dekat dengannya. Unsur sosial kewarganegaraan masuk jauh kemudian dan pada awalnya bersumber dari keanggotaan komunitas lokal dan asosiasi fungsional. Sumber ini dilengkapi dengan sistem regulasi pengupahan yang disusun secara nasional dan dikelola secara lokal. Sistem peraturan pengupahan dengan cepat membusuk karena perubahan industri dan ketidaksesuaiannya dengan ide-ide baru tentang hak-hak sipil.

Dengan demikian Marshall masuk ke ranah memandang kewarganegaraan dari perspektif kelas sosial. Dengan berubahnya sifat kapitalisme, sifat kewarganegaraan juga berubah, ke versi yang lebih rumit. Perubahan ekonomi membawa bagian-bagian yang lebih baru ke kekuasaan-kaum industrialis sekarang lebih kuat daripada tuan tanah yang menikmati hak istimewa dalam sistem feodal. Kelas-kelas baru yang naik ke tampuk kekuasaan sekarang menuntut lebih banyak hak, dan dengan demikian mereka bergerak menuju demokratisasi untuk melindungi kepentingan mereka, terutama kepentingan akumulasi kepemilikan dan apa yang disebut kesetaraan. Gagasan kewarganegaraan yang baru tumbuh sekarang seharusnya melindungi orang-orang yang berkuasa, kelas borjuis yang bertujuan untuk memperluas ekonomi pasar kapitalis dan hak-hak kewarganegaraan seharusnya memajukan proses tersebut. Namun, kelas feodal yang sebelumnya menikmati kekuasaan kini ditinggalkan begitu saja. Beberapa hak

diberikan kepada kelas pekerja, seperti hak politik, melalui berbagai gerakan sosialis.

Tetapi berbagai kepentingan dari kelas yang berbeda secara bertahap menyebabkan konflik yang lebih besar. Sementara para industrialis bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan tidak ada pajak, negara kesejahteraan kewarganegaraan sosial perlu meningkatkan perpajakan. Kewarganegaraan sosial memastikan penyediaan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan bersama dengan aturan upah minimum, aturan untuk jam kerja minimum, kondisi kerja minimum, keselamatan kerja dan kompensasi jika terjadi kecelakaan di tempat kerja dll. Ideologi kapitalis didasarkan pada ketidaksetaraan dan eksploitasi pekerja dan dengan demikian konsep hak-hak sosial melukai ideologi kapitalis. Negara menangani dua kepentingan yang berlawanan ini dengan memberikan beberapa hak kepada kelas pekerja, mencegah mereka melanjutkan ke konflik yang lebih besar yang dapat menggulingkan sistem.

Pengenalan hak kewarganegaraan dengan demikian tidak mengakhiri ketidaksetaraan, tetapi hanya memberikan ilusi kesetaraan, lebih jauh mendorong kembali kelas pekerja ke dalam sistem eksploitatif sambil menghibur mereka dengan perbaikan eksternal.

Menurut (Turner,1990) Kewarganegaraan mempunyai 2 bentuk ialah aktif dan pasif. Kewarganegaraan yang aktif ditinjau dari bagaimana upaya dari warga dalam merespon kebutuhan dan ikut berpartisipasi menyelesaikan suatu permasalahan masyarakat sebagai kewajiban warga. Menurut Joppke, 2002; Kymlicka, 1997; Stokke, 2018 kewarganegaraan aktif tidak hanya terfokus pada

pemenuhan hak, keanggotaan dan identitas namun dilihat saat mengambil tindakan partisipasi warga secara langsung atau tidak langsung. Kewarganegaraan pasif dominan mempunyai sikap hanya menerima serta pasif dalam kebutuhan masyarakat dan berpartisipasi.

Warga mempunyai peran sentral dalam menangani penyebaran virus corona. Partisipasi yang warga lakukan guna menangani Covid-19 dengan cara mengedukasi warga mengenai virus corona serta upaya pencegahannya. Warga melakukan kebiasaan hidup bersih agar sehat selalu guna meminimalisir pencegahan penularan virus corona. Bentuk lain dari partisipasi adalah tindakan langsung yang sifatnya filantropi. Untuk kategori tingkat partisipasi warga saat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia ialah partisipasi degree of citizen power di tingkat partnership, perlu dilakukan guna membangun sinergitas Negara dan warganya agar dapat meningkatkan tingkat kesehatan supaya tinggi, menyeluruh, serta berkelanjutan.

2.2.3 New Normal

Kenormalan baru ialah memulai kembali aktivitas yang pernah dibatasi seperti aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik namun dengan catatan secara terbatas dengan tetap menggunakan protocol kesehatan terkait Covid-19. WHO menganjurkan masyarakat melakoni perubahan perilaku atau kenormalan baru. Virus covid-19 tidak sepenuhnya hilang, masih ada namun sudah tidak sedominan pada tahun 2019-2022 awal tahun. Masyarakat perlu menyadari bahwa kehidupan kita saat ini berdampingan dengan virus ini, kehidupan yang berlangsung saat ini tidak sepenuhnya dapat kembali seperti kehidupan dulu sebelum hadirnya pandemi.

Kita tidak mampu menjalani kehidupan dengan penerapan pola hidup normal yang dahulu, namun perlu ada Kenormalan Baru. Dalam kenormalan baru terdapat penyesuaian masyarakat dalam menghadapi pandemi yang sudah diberikan toleransi seperti pada saat pandemi masyarakat yang bekerja hanya diizinkan 20%-25% pada saat era *new normal* sudah mencapai 50%-80% karyawan yang *work from office* terdapat aturan tertulis bagi para pekerja dalam Permenkes No: Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Pada perubahan sosial masyarakat di *era new normal* yaitu diperbolehkannya masyarakat melakukan aktivitas ibadah ke tempat ibadah, sosialisasi secara langsung dengan individu lain bahkan sudah diperbolehkannya kegiatan mudik pada saat bulan suci Ramadhan dengan catatan sudah menerima vaksin 1,2 dan *booster*, dalam perubahan masyarakat pada kesehatannya, RS sudah boleh menerima pasien yang perlu rawat inap tanpa terindikasi positif Covid-19, test antigen atau PCR harganya sudah relatif terjangkau, angka positif Covid-19 sudah menurun. Semua kegiatan tersebut diizinkan berlangsung dengan syarat menjaga protokol kesehatan seperti penggunaan masker pada saat keluar rumah, mencuci tangan atau sedia *hand sanitizer*, dan lain-lain.

2.2.4 Tokoh Masyarakat & Kesadaran kewargaan

A. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat, dalam hal ini menurut kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dengan arti lain seperti

jenis badan, orang yang terkemuka didalam lapangan politik suatu masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan individu yang memiliki kedudukan dalam lingkungannya serta memiliki pengaruh besar atas ucapan dan tindakannya kerap kali dijadikan panutan karena warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sosok pemimpin tersebut, serta dijadikan sebagai pengantar aspirasi antar masyarakat . Tokoh masyarakat dianggap penting oleh masyarakat dan terbiasa dengan kepentingan umum. Tokoh masyarakat terdiri dari 2 status formal seperti Lurah, Walikota, dan lain-lain, informal seperti kiai, seniman, guru, dan lain-lain.

Tokoh masyarakat memiliki kekuatan dan wewenang dalam mengatur warganya, mereka melakukan tindakan preventif, represif, serta kuratif guna mencapai tujuan terbaik agar seluruh masyarakat sejahtera, aman, tertib. Tindakan-tindakan tersebut bukan serta merta atas keinginan pribadi dari tokoh masyarakat namun mereka memiliki acuan seperti pemerintah serta kebijakan-kebijakan undang-undang.

B. Kesadaran Kewargaan Masyarakat.

Masyarakat memiliki kesadaran kewargaan yang berbeda-beda dalam menanggapi sesuatu yang diatur atau dianjurkan. Terdapat kesadaran kewargaan dari masyarakat, diantaranya:

a. Patuh

Menurut Darley dan Blass dalam Hartono, patuh ialah sikap yang dimiliki oleh individu dilihat dari aspek dalam mempercayai (*belief*), menerima (*accept*) setelahnya melakukan (*act*) semua aspek tersebut timbul atas respon dari permintaan atau terdapat perintah dari orang lain. Dimensi patuh yang hubungannya

dengan sikap individu yaitu mempercayai dan menerima, sedangkan yang berhubungan dengan tingkah laku individu mencakup dimensi melakukan atau bertindak.

b. Kurang Patuh

Kurang patuh merupakan perilaku individu yang setengah patuh dan setengah tidak patuh, individu ini menaati aturan namun di suatu waktu tidak menaati aturan tersebut. Beberapa hal yang menjadi alasan individu kurang patuh diantaranya lupa dan bosan dengan aturan.

c. Tidak patuh

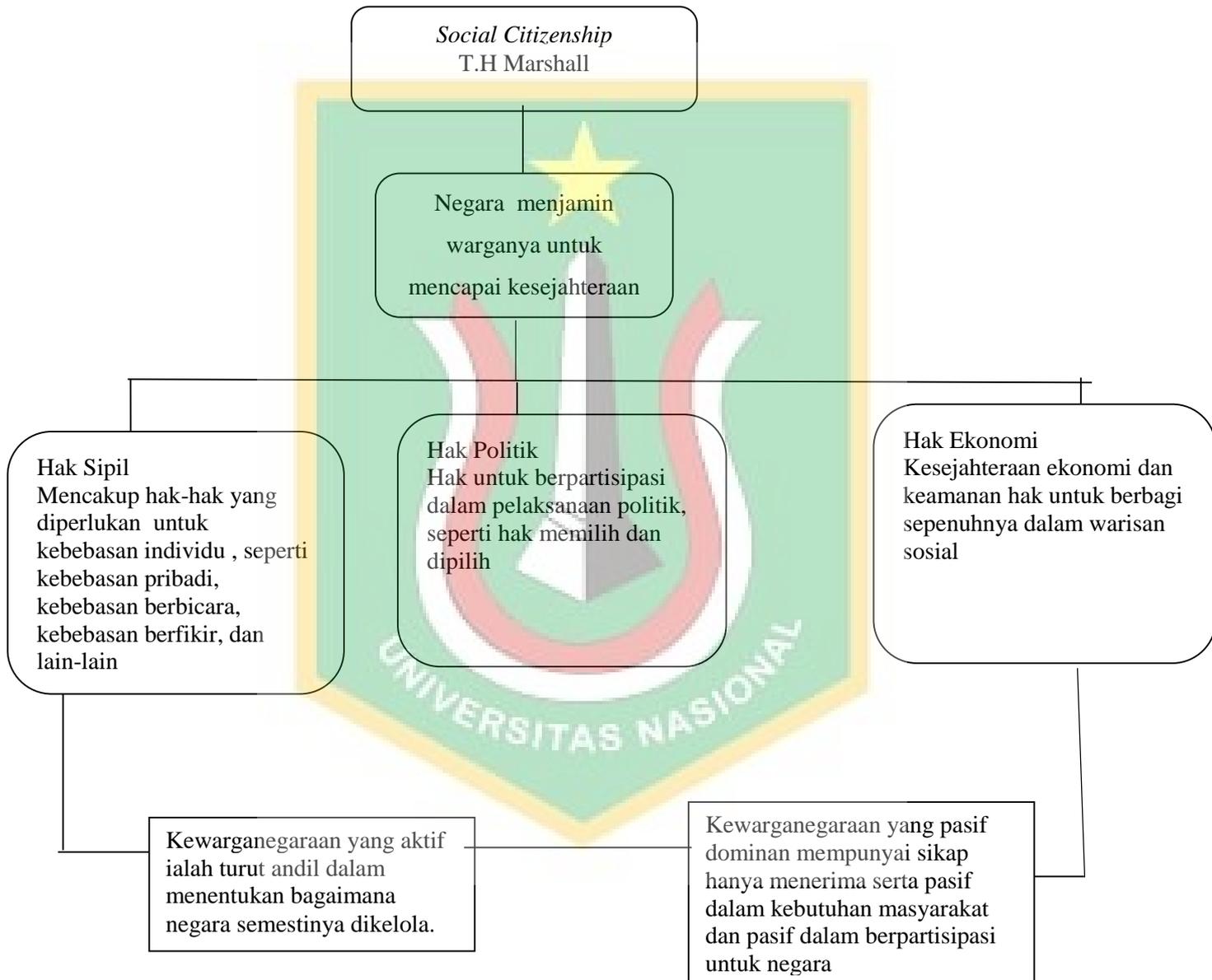
Tidak patuh merupakan sikap dan perilaku menolak atau menyimpang dari aturan-aturan yang telah berlaku di masyarakat. Faktor individu yang melakukan tindakan tidak patuh diantaranya kurang menambah informasi atau wawasan, lingkungan sekitar yang memang berperilaku tidak patuh, serta menyepelekan suatu aturan.

2.2.5 Teori *Social Citizenship*

Kewarganegaraan Sosial menurut Marshall merupakan bentuk hak-hak yang dilindungi oleh Negara, Negara menjamin warganya untuk mencapai kesejahteraan warganya baik dalam hak sipil, politik dan sosial.

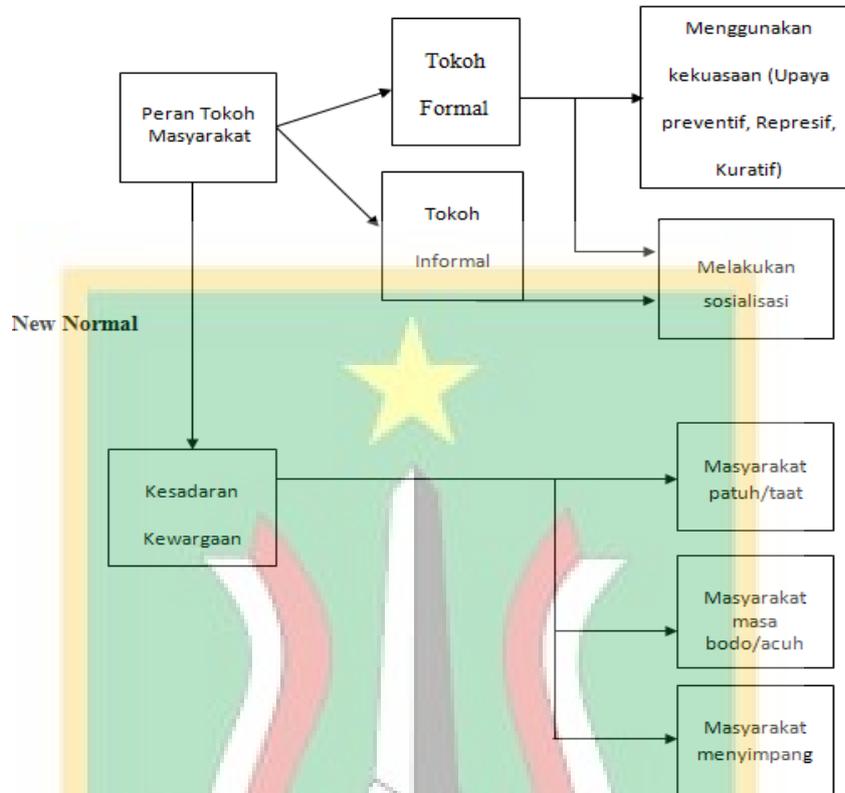
Hak sipil terdiri dari hak-hak yang diperlukan untuk kebebasan individu, seperti kebebasan pribadi, kebebasan berbicara, kebebasan berfikir, dan lain-lain. Negara menjamin kesejahteraan warganya dalam hak politik seperti hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan politik, sebagai anggota badan yang memiliki otoritas politik atau sebagai pemilih dari anggota badan tersebut . Negara

menjamin kesejahteraan warganya dalam hak sosial yang meliputi kesejahteraan ekonomi, budaya dan keamanan hak untuk berbagi sepenuhnya dalam warisan sosial.



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

1.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Mengacu kepada kerangka berfikir di atas, dapat dijelaskan bahwa pada era *new normal* dengan adaptasi baru yang dilakukan masyarakat memerlukan peran tokoh masyarakat dalam mengatur aktivitas masyarakat di era *new normal* karena kita belum sepenuhnya hidup tanpa virus Covid 19 namun masyarakat masih hidup berdampingan dengan virus Covid 19. Tokoh masyarakat memiliki peran tersendiri dalam hal ini tokoh masyarakat terbagi menjadi 2 yaitu tokoh masyarakat formal yang menggunakan kekuasaannya dalam menjalankan peran melakukan upaya preventif, represif dan kuratif. Tokoh masyarakat informal hanya melakukan sosialisasi untuk masyarakat sekitarnya dengan memberi teguran tanpa memberi sanksi secara tertulis.

Upaya preventif merupakan suatu pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma sosial, tindakan ini dilakukan supaya masyarakat dapat mentaati aturan serta paham dengan konsekuensi atas tindakannya. Upaya represif merupakan suatu pengendalian yang dilakukan pada sebuah lingkungan masyarakat setelah terjadinya perilaku yang melanggar aturan atau penyimpangan di masyarakat. Upaya kuratif merupakan upaya terakhir setelah upaya represif yang dapat dilakukan ialah dengan memberi sanksi atau ganjaran agar penyimpangan tersebut tidak terulang.

Kesadaran kewargaan juga tercipta pada era *new normal* baik itu kesadaran yang meningkat atau kesadaran yang menurun dalam menaati aturan atau untuk kebaikan diri nya sendiri. Dalam hal ini masyarakat terbagi menjadi 3 kelompok diantaranya ialah masyarakat patuh yaitu masyarakat yang paham serta mengaplikasikan peraturan atau anjuran yang telah tokoh masyarakat berikan agar terciptanya kesadaran kewargaan untuk kebaikan bersama serta untuk proteksi dirinya sendiri. Kedua terdapat masyarakat kurang patuh ialah masyarakat yang paham aturan, berperilaku sesuai aturan namun terkadang melanggar aturan yang sudah diterapkan karena beberapa faktor seperti lupa, atau sedang jenuh harus selalu menaati peraturan sehingga terkadang melakukan penyimpangan. Ketiga yaitu masyarakat tidak patuh masyarakat dalam kelompok ini ialah masyarakat yang sepenuhnya melakukan penyimpangan tanpa berfikir keselamatan untuk orang sekitar, faktor terjadinya kurangnya wawasan mengenai peraturan yang berlaku atau tidak ingin merepotkan diri sendiri dengan menaati anjuran tokoh masyarakat.